

IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN PARIWISATA BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN OLEH DINAS PARIWISATA KABUPATEN PONOROGO

Oleh
Oki Widyanarko

Abstract

Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata untuk pariwisata ramah lingkungan di Kabupaten Ponorogo belum optimal. Untuk alasan ini, perlu untuk mereformasi dan mengembangkan Kantor Pariwisata melalui peningkatan fungsi, peningkatan produktivitas dan efisiensi yang akan berimplikasi pada keputusan untuk membuat perubahan dalam budaya, sistem penugasan, dan menyesuaikan program dan anggaran serta aplikasi sistem teknologi komunikasi dan penggunaan sumber daya manusia yang tepat.

Keyword: *Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktural Birokrasi*

Pendahuluan

Indonesia memiliki kawasan terumbu karang terkaya di dunia dengan lebih dari 18% terumbu karang dunia, serta lebih dari 3.000 spesies ikan, 590 jenis karang batu, 2.500 jenis moluska, dan 1.500 jenis udang-udangan. Kekayaan biota laut tersebut menciptakan sekitar 600 titik selam yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Raja Ampat di Provinsi Papua Barat adalah taman laut terbesar di Indonesia yang memiliki beraneka ragam biota laut dan dikenal sebagai lokasi selam scuba yang baik karena memiliki daya pandang yang mencapai hingga 30 meter pada siang hari.

Hasil riset lembaga Konservasi Internasional pada tahun 2001 dan 2002 menemukan setidaknya 1.300 spesies ikan, 600 jenis terumbu karang dan 700 jenis kerang di kawasan Raja Ampat. Bunaken yang terletak di Sulawesi Utara memiliki 25 titik selam dengan kedalaman hingga 1.556 meter. Hampir 70% spesies ikan di Pasifik Barat dapat ditemukan di Taman Nasional ini. Terumbu karang di taman nasional ini disebut tujuh kali lebih bervariasi dibandingkan dengan Hawaii. Beberapa lokasi lain yang terkenal untuk penyelaman antara lain: Wakatobi, Nusa Penida, Karimunjawa, Derawan dan Kepulauan Seribu.

Keanekaragaman flora dan fauna yang ada di seluruh nusantara menjadikan Indonesia cocok untuk pengembangan agrowisata.[butuh rujukan]Kebun Raya Bogor yang terletak di Bogor merupakan

lokasi agrowisata populer yang telah berdiri sejak abad 19 dan merupakan yang tertua di Asia dengan koleksi tumbuhan tropis terlengkap di dunia. Hingga Maret 2010, Kebun Raya Bogor memiliki koleksi 3.397 spesies jenis koleksi umum, 550 spesies tumbuhan anggrek, serta 350 tumbuhan non-anggrek yang berada di rumah kaca. Taman Wisata Mekarsari merupakan taman buah tropis terbesar dan terlengkap di dunia. Koleksi taman ini mencapai 100.000 tanaman buah yang terdiri dari 78 famili, 400 spesies, dan 1.438 varietas.

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Kabupaten Ponorogo adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Timuryang terletak sekitar 192 km dari Ibukota Provinsi Jawa Timur Surabaya terletak di bagian selatan Pulau Jawa dengan luas wilayah Kabupaten Ponorogo berupa dataran rendah, dan sisanya merupakan dataran tinggi dan pegunungan yang memiliki banyak sumber mata air dan fenomena alam yang tersebar di seluruh daerah di Kabupaten Ponorogo, wilayah yang berupa daratan tinggi Kabupaten Ponorogo memiliki beberapa obyek wisata alam yang dapat menjadi daerah tujuan wisata bagi pengunjung ataupun wisatawan.Berdasarkan hasil pra survey tidak semua objek wisata alam yang

ada di Ponorogo dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo sebagian masih dikelola oleh masyarakat sekitar.

Disisi lain, semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup yang lain, dengan demikian lingkungan hidup mencakup dua lingkungan yaitu lingkungan fisik dan lingkungan budaya. Adapun secara praktis ruang yang dimaksud selalu dibatasi menurut kebutuhan yang dapat ditentukan. Lingkungan merupakan unsur penting sumber daya alam nasional, memiliki arti dan peran yang sangat besar pengaruhnya pada aspek kehidupan sosial, lingkungan hidup, dan pembangunan.

Kondisi alami keindahan alam di Kabupaten Ponorogo dalam kenyataan berpotensi untuk dijadikan tujuan wisata, karena Kabupaten Ponorogo memiliki daya tarik wisata baik berupa objek wisata alam dan budaya yang berkisar \pm 30 daya tarik wisata. Bentuk objek tersebut ada dua yaitu alam dan buatan. Meski masih merupakan daerah yang belum begitu berkembang, namun pariwisata Kabupaten Ponorogo sudah mampu menarik wisatawan baik lokal, nusantara maupun wisatawan

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang fenomena permasalahan dalam pengembangan di bidang pariwisata yang terkait dengan kondisi lingkungan di Kabupaten Ponorogo di atas, maka dalam penelitian ini pembahasannya menggunakan landasan teori yang terkait dengan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata yang telah peneliti kemukakan di atas, maka peneliti menggunakan acuan teori George C Edward III, dalam pendekatan teori tersebut terdapat empat variabel yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil apabila keempat faktor kritis yang dimaksud dan mendukung adalah :

1. Komunikasi; 2. Sumberdaya; 3. Disposisi; dan 4. Struktur birokrasi. (George C. Edward III, 1990,149-154.)

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Melalui metode deskriptif akan diketahui gambaran ilmiah yang menjelaskan tentang implementasi pengembangan wisata di

Kabupaten Ponorogo sebagai destinasi wisata. Alasan lainnya peneliti bahwa Kabupaten Ponorogo menawarkan beberapa keindahan wisata alamnya secara analogis bisa untuk refreking dan berkreasi dengan keluarga setelah sepekan bekerja.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif menekan pada makna (Sugiyono, 2008: 205). Pada dasarnya penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian yang merujuk pada objek dan fenomena yang terjadi secara alami. Adapun data yang akan diperoleh akan bersifat deskriptif karena menggunakan pendekatan induktif.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan induktif dimana peneliti melakukan pengamatan atas permasalahan kebijakan perlindungan dan pelestarian alam, budaya dan sosial ekonomi, serta benda-benda peninggalan sejarah yang ada di Kabupaten Ponorogo. Kemudian menarik kesimpulan secara umum dengan dukungan dari beberapa informasi, sehingga data yang akan diperoleh akan bersifat deskriptif.

Kemudian, penentuan lokasi suatu penelitian dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup pembahasan sekaligus untuk mem-pertajam fenomena pariwisata yang ingin dikaji. Pendekatan ini cocok untuk meneliti tentang kebijakan Pemerintah yang ada di Kabupaten Ponorogo dalam pelestarian alam wisata, serta cagar budaya maupun situs yang ditemukan diberbagai wilayah Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini dilaksanakan dengan menganalisis data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung di lapangan.

Sedangkan unit analisisnya berupa benda, personal dinas pariwisata, peneliti akan mem-fokuskan penelitian pada dialog/wawancara dengan petugas dinas yang terkait dengan bidang kepariwisataan, wujud tindakan, setting, ilustrasi yang terdapat lokasi wisata dengan mengetahui makna pesan apa yang terkandung dalam benda, situasi kondisi alam dan lingkungan tersebut. Dengan dibatasi pada subyek yang

dikaji, diharapkan nantinya tidak akan melebar pada persoalan-persoalan yang jauh dari subyek-subyek tersebut. Selain itu, pentingnya penentuan unit analisis ini, agar validitas reabilitas dapat terjaga.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Komunikasi

Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo mensosialisasikan tentang implementasi kebijakan.

- a. Transmisi komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses penyaluran informasi mengenai suatu hal dari Kepala Dinas Pariwisata kekepala bidang bagian pari-wisata dan kepada masyarakat. Dalam hal pengembangan objek wisata, transmisi komunikasi disalurkan melalui proses penyaluran informasi dari Kepala Dinas Pariwisata kepada Kepala Bagian melalui rapat koordinasi antar bidang. Sosialisasi dalam pengembangan objek wisata berwawasan lingkungan kepada masyarakat dilakukan di setiap kawasan wisata termasuk kawasan wisata Telaga Ngabel lewat suatu kegiatan, sosialisasi secara tidak langsung seperti pemanfaatan pamflet, baliho dan sebagainya, sehingga informasi yang didapatkan oleh masyarakat kurang maksimal. Oleh karena itu Dinas Pariwisata sebaiknya melakukan sosialisasi secara langsung dengan rutin/ terus-menerus kepada masyarakat.
- b. Kejelasan informasi berperan penting dalam menunjang kelancaran informasi antara Kepala Dinas Pariwisata selaku pembuat kebijakan dan bagian-bagiannya serta masyarakat selaku pelaksana kebijakan. Sosialisasi promosi wisata dalam rangka pengembangan objek wisata berwawasan lingkungan berpengaruh kepada kemampuan Dinas Pariwisata dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, Dari sisi komunikasi pemasaran yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo tidak lepas dari lingkup promosi.
- c. Model komunikasi Dinas Pariwisata dan kebudayaan dalam mengkomunikasikan objek wisata yang ada di Kabupaten Ponorogo, meliputi:

1. Promosi dalam bentuk Personal selling, yaitu berkomunikasi langsung tatap muka antara Dinas Pariwisata kepada wisata-wan guna membentuk pemahaman terhadap objek wisataseperti pameran dan event, pameran biasanya diadakan sendiri maupun mengikuti pameran di daerah lain.
2. Iklan, merupakan bentuk komunikasi tidak langsung yang didasari pada informasi tentang ke-unggulan suatu objek wisata yang ada di Kabu-paten Ponorogo. Telah di-susun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan dan melakukan kunjungan.
3. Direct marketing bauran promosi yang bersifat melakukan sosialisasi secara langsung dengan rutin/ terus-menerus ke-pada masyarakat. Kejelas-an informasi berperan penting dalam menunjang kelancaran informasi antara Kepala Dinas Pariwisata selaku pembuat kebijakan dan bagian-bagiannya serta masya-rakat selaku pelaksana kebijakan. Sosialisasi promo-si wisata dalam rangka pengembangan objek wisata berwawasan ling-kungan sangat ber-pengaruh kepada ke-mampuan Dinas Pari-wisata dalam menyampaik-an informasi kepada masyarakat, Ko-munikasi merupakan fak-tor penting berjalannya organisasi/ lembaga termasuk sosialisasi visi misi, strategi dan operasional Dinas Pari-wisata Kabupaten Pono-rogo. Komunikasi sebagai penghubung antara pe-mangku kebijakan dan pelaksana kebijakan baik itu antar lembaga pemerin-tah dengan lembaga lain seperti dunia usaha pari-wisata atau masya-rakat, demikian juga untuk menjalin interaksi personal antar pelaku-pelaku pari-wisata dalam menyatakan keinginan dan rencana pelaksanaan program pari-wisata. Termasuk untuk memaksimalkan implementasi potensi pariwisata sebagai peng-gerak pemerataan dan peningkatan pembangunan.

Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (inconsistent) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama

memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif. (Van Meter dan Van Horn dalam Agustino, 2006:162).

Sumber Daya

Sumber daya adalah perangkat mutlak dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo membutuhkan sumber daya yang mencukupi dan memadai baik dari segi kualitas dan kuantitasnya yang terkait dengan ketrampilan, dedikasi, profesionalitas dan kompetensi dibidang pariwisata. Namun masalah utamanya sering terletak pada perhatian dan komitmen (dedikasi dan profesionalitas) sumber daya manusia yang terlibat.

Implementasi yang maksimal atau efektif dan efisien mengindikasikan perlunya sumber daya yang cukup memadai. Kurangnya perhatian dan komitmen pegawai dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan pariwisata mengindikasikan terbatasnya sumber daya baik SDM maupun sumber dana.

Terdapat kecenderungan di-mana ada banyak pegawai lebih nyaman duduk-duduk saja ketika hari-hari kerja, kurang inisiatif yang muncul dari mereka kecuali pada saat mendapat instruksi dari pimpinan untuk melaksanakan kegiatan. Serta minimnya perhatian dan komitmen pegawai terhadap tugas dan tanggung jawabnya yang merupakan indikator yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada lingkungan Dinas.

Selain itu kurangnya pembekalan melalui program orientasi dan pelatihan tentang peran dan tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai berkaitan dengan pengembangan pariwisata. Disamping itu sering kali ketika ada instruksi kepada pegawai mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pariwisata, pegawai kurang memahami sehingga tidak dapat dilakukan dengan baik.

Ini semakin bertambah rumit dengan kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh pegawai, tidak hanya itu bahkan komitmen dari pegawai dalam pelaksanaan Renstra pun sangat rendah. Apabila SDM dilatih dan

menguasai pekerjaannya, mereka akan mampu berkontribusi positif dalam merealisasi tanggung jawab dan mengembangkan tugas dan kewajiban yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo.

Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo sebagai ujung tombak/leading sektor kurang memperhatikan penerimaan disposisi atau instruksi dari atasan, dan pegawai kurang memahami apa yang hendak dilakukan atau yang dimaksudkan, maka dapat dipastikan bahwa implementasi kebijakan pariwisata tidak akan berhasil masalah ini yang tergambar dalam hubungan-hubungan yang terjalin antara perumus kebijakan pariwisata dan pelaksana kebijakan di Kabupaten Ponorogo.

Disposisi

Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata ber-wawasan lingkungan di Kabupaten Ponorogo sebagaimana dikemukakan oleh informan penelitian melalui wawancara serat sebagaimana pengamatan peneliti dilapangan maka dapat dikatakan belum optimal hal ini dikarenakan implementasi kebijakan pariwisata belum mencerminkan political will karena pemerintah tidak menindak lanjuti rencana pengembangan pariwisata (*grand design*) yang telah disusun para pengelola pariwisata, dan masyarakat belum menggantungkan mata pencahariannya kepada sektor pariwisata, minimnya rasa memiliki dan usaha untuk menciptakan kreatifitas, minimnya koordinasi dengan para pemangku adat dan budaya, serta masyarakat dan pemilik wisata.

Struktur Birokrasi

Selama ini pemerintah Kabupaten Ponorogo kurang menjabarkan tupoksi dan struktur birokrasi antarinstansi atau antar lembaga secara integral sehingga mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan yang cenderung ego sektoral. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk menjabarkan hubungan dan koordinasi antar instansi mengindikasikan perlunya SOP yang integral dan holistik untuk dijadikan sebagai pedoman dan acuan setiap instansi menjabarkan tupoksi yang dimiliki berkaitan

dengan upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Ponorogo.

Sebagaimana Suwitri (2008:261), menjelaskan istilah “Implementing Organization” mak-sudnya birokrasi pemerintah yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Senada dengan itu Tachjan (2006:27), menjelaskan birokrasi ini memegang peran dominan dalam implementasi program dan kebijakan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa peran pemerintah sangat penting dalam melaksanakan suatu kebijakan karena pemerintah memiliki akses untuk melakukan komunikasi dengan seluruh elemen yang berkaitan dengan kebijakan yang akan di laksanakan.

Penutup

Melihat secara keseluruhan uraian yang ada, maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata berwawasan lingkungan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo belum optimal menerapkan empat variabel teori George Edward III dalam implementasi kebijakan pariwisata. Untuk itu perlu pembenahan dan pengembangan organisasi Dinas Pariwisata melalui perbaikan fungsi, peningkatan produktivitas dan efisiensi yang akan berimplikasi terhadap keputusan mengadakan perubahan secara kultur, sistim penugasan, dan penyesuain program dan anggaran serta penerapan sistim teknologi komunikasi dan pemakaian sumber daya manusia yang tepat.

Daftar Pustaka

- Agustino, 2010, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van
- Edward III, George C (edited),1990, Public Policy Implementing, Jai Press Inc, LondonEngland. Goggin, Malcolm L et al. 1990, hlm 149-154.
- Imam Gunawan, 2014, Metode Kualitatif Teori dan Praktek, Bumi Aksara, Jakarta
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier.Implementation and Public

Policy,ScotForesman and Company, USA, 1983, hlm 139.

- Sugiyono, 2005, Metode Penelitian Administrasi Edisi ke 13, Alfabeta, Jakarta
- Suwitri, Sri, 2008, Konsep Dasar Kebijakan Publik, Semarang, Undip
- Tachjan, H. (2012). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI – Puslit KP2W Lemlit UNPAD
- <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/industri-sektor/pariwisata/2010>.
- <https://www.matamatapolitik.com/kunjungan-militer-fokuskan-hubungan-keamanan-indonesia-vietnam-analisis/>).
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pariwisata_di_Indonesia,2001-2002.
- Horn, 2010, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 5 September 2010, hlm 139.